



KERTAS POSISI KEBIJAKAN REKOMENDASI PRBBK DI INDONESIA HASIL KONFERENSI NASIONAL PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS XIV 2021



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade



Kertas posisi ini adalah hasil sintesa dan analisis dari kajian bijakan yang kemudian di evaluasi melalui proses refleksi di 20 wilayah. Hasil sintesa dari temuan-temuan di wilayah dibawa ke dalam KN PRBBK XIV 2021, dengan agenda utama adalah melaksanakan Sidang Komite dan Pleno yang menghadirkan narasumber dari Universitas, K/L, INGO, NGO, Media dan komunitas yang merepresentasikan 9 region atau pulau di seluruh Indonesia (Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua) untuk merumuskan temuan-temuan kunci yang direfleksikan untuk di diskusikan dan melakukan triangulasi yang mengkonfirmasi berbagai sumber. Tiga isu utama yang menjadi bahasan dalam sidang komisi dan pleno yang melibatkan secara akumulatif lebih dari 8,000 peserta dari seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari unsur masyarakat umum, komunitas, relawan, organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi penyandang disabilitas, lembaga berbasis agama/keyakinan, pemerintah, entitas swasta, media massa, dan akademisi. Pembahasan sidang komite bertujuan untuk merumuskan satu kertas posisi kebijakan yang akan menjadi bahan untuk membangun peta jalan PRBBK di Indonesia. Fokus pembahasan sidang Pleno adalah :

1. Tata Kelola PRBBK: Kebijakan Operasional, Mekanisme Pendanaan, dan Pelembagaan PRBBK

Tata Kelola PRBBK di Indonesia mulai dari kebijakan operasional, mekanisme pendanaan dan pelembagaan PRBBK. Dalam diskusi pleno 1 diidentifikasi berbagai kebijakan yang dapat mendukung PRBBK di desa dan komunitas, yang berkaitan dengan program berbasis desa yang memiliki lokus di desa dari berbagai kementerian dan lembaga. Secara operasional kebijakan-kebijakan yang ada telah memberi ruang dalam mengimplementasikan PRBBK melalui program desa dan dana desa. Tantangan yang dihadapi adalah banyaknya program dari berbagai kementerian sehingga membuat desa memiliki beban yang berat untuk melaksanakan semua program, karena tidak ada sinkronisasi antara satu program dengan yang lain. Disisi lain, ada peluang untuk melakukan sinkronisasi antar semua program yang di implementasikan di desa, karena sudah ada panduan/dasar hukum untuk mengintegrasikan program.

Untuk bisa mencapai tujuan besar tersebut, harus ada kesepahaman antara semua stakeholder baik di tingkat desa sampai tingkat yang lebih atas. Pada tingkat terbawah harus didukung oleh kebijakan di daerah atau Peraturan Daerah (Perda) yang dapat menjembatani program-program berbasis desa, karena desa sangat tergantung kepada pemerintah daerah sebagai pengampu di daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program PRB sangat mungkin untuk masuk dan diintegrasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh lembaga/kementerian lain dengan memanfaatkan sumber pendanaan di tingkat desa. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas terhadap pemerintah daerah dan aparat pemerintah desa. Isu desentralisasi PRB di tingkat desa cukup menarik dibahas adalah bagaimana pemerintah di tingkat kota/kabupaten mendukung desa untuk bisa mengoptimalkan upaya PRB di desa.

2. Model Ketangguhan, Strategi Perluasan termasuk di dalamnya replikasi, modifikasi, inovasi, dan kolaborasi.

PRBBK adalah gerakan dalam masyarakat untuk membangun kepedulian dalam mengurangi risiko bencana. Tujuan PRBBK adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka berada di daerah rawan bencana, dengan adanya kesadaran tersebut harapannya masyarakat lebih aktif dalam aktivitas membangun kesiapsiagaan. Karena masyarakat adalah *first responder* ketika ada kejadian bencana, sehingga kesiapsiagaan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Berbicara tentang replikasi, substansinya adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana, maka masyarakat harus mengembangkan pola PRB sesuai dengan kearifan lokal mereka dalam menghadapi risiko bencana. Replikasi yang dilakukan selama ini terus dikembangkan dengan berbagai inovasi. Sebagai contoh, pendekatan di komunitas Merapi yang sudah dianggap berhasil, namun pada kenyataannya ada ketidakselarasan dengan pemerintah. Belajar dari kondisi ini, saat replikasi di lokasi lain pendekatannya dikembangkan secara berbeda, yaitu melibatkan pemerintah dari awal. Kritik untuk program Destana, kenapa desa yang ditangguhkan, kenapa bukan kawasan yang ditangguhkan? Karena berbicara bencana akan berbicara kawasan. upaya PRB harus berbasis kawasan dan diharapkan setiap wilayah dapat saling koordinasi dan kolaborasi

dalam PRB. Inovasi bermakna PRBBK harus terus berkembang dan ada pembaharuan. Sebagai contoh, isu bencana saat ini bukan isu tunggal, dalam satu waktu dapat terjadi lebih dari satu jenis bencana yang berbeda, oleh sebab itu, isu inovasi harus terus dikembangkan, jika tidak maka model/metode PRBBK kita akan ketinggalan. Koordinasi bukan sekedar memperebutkan sumber daya, koordinasi adalah suatu hal yang sangat penting, karena jika proses koordinasi tidak berjalan dengan baik, proses penanggulangan bencana akan *chaos*. Koordinasi tidak hanya penting bagi pelaku PRB saja, namun juga bagi donor. Jika upaya ini tidak dilakukan dengan baik, akan terjadi tumpang tindih aktivitas dan hanya akan menyianyikan sumber daya yang ada. Untuk membangun kemitraan yang baik adalah dengan mengurangi ego sentris kelembagaan. Kemitraan dapat dibangun antar organisasi masyarakat sipil/*civil society organization* (CSO), kemitraan CSO dengan pemerintah, dan CSO dengan donor. Catatan penting kemitraan CSO dengan pemerintah harapannya tidak sekedar satu atau dua kali pertemuan bersama, sehingga esensi kemitraan tidak berjalan. CSO tidak hanya sekedar ditempelkan dan menjadi klaim bahwa pemerintah sudah bermitra dengan masyarakat melalui CSO. Pendekatan PRBBK ini juga beraneka ragam dan bisa jadi semua pendekatan tersebut benar. Beberapa varian PRBBK di Indonesia antara lain waktu, pelaku, hubungan, partisipasi, ruang, isu, alat atau tools, dan sumberdaya. Setiap kelompok/komunitas mempunyai varian yang berbeda-beda dan bisa jadi semua benar, selama tidak lepas dari substansi PRBBK itu sendiri yaitu bersifat *bottom-up*, melibatkan masyarakat secara partisipatif, dan melindungi masyarakat dengan berbagai aset yang dimiliki.

3. Monitoring Evaluasi PRBBK di Indonesia: Kontrol Kualitas, Penguatan Gerakan/program PRBBK, Kemandirian dan Keberlanjutan

Catatan penting dalam perjalanan PRBBK adalah dengan mengakomodir keberagaman dengan mempertimbangkan kebudayaan dan kebijakan lokal, berdasarkan hasil diskusi di wilayah, ditemukan kondisi bahwa kegiatan PRBBK belum mengakomodir kultur dan budaya di seluruh wilayah di Indonesia. Sintesa dari diskusi refleksi di wilayah-wilayah adalah : (1) Pengintegrasian pendidikan bencana dengan aspek *livelihood*; (2) Pelibatan

aktif perempuan secara formal; (3) Pengakuan budaya lokal; (4) Penguatan modal sosial; (5) Peran relawan belum mendapatkan dukungan yang optimal serta komitmen pemegang otoritas; (6) Pengintegrasian kemampuan sumber daya alam melalui aktivitas ekonomi komunitas yang tinggal di kawasan rawan bencana; (7) Regenerasi dan kaderisasi; (8) Alat pendukung aksi-aksi komunitas masih terbatas; (9) Dibutuhkan dukungan pihak eksternal; (10) Perubahan paradigma sebagai korban yang harus dibantu; (11) Proses-proses intervensi yang memberdayakan masyarakat dan mengubah pola pikir sebagai pelaku pembangun ketangguhan. Berbicara keberlanjutan PRBBK, ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu: efektifitas, partisipasi, dan kesetaraan. Pantauan kualitas dan inklusi tidak lepas dari proses monitoring dan evaluasi. Program nasional Destana BNPB sesuai Perka BNPB No. 1 Tahun 2012. Strategi PRBBK sesuai John Twigg 2007 dalam buku Pengalaman Indonesia Membangun Ketangguhan Masyarakat: tata kelola, pengkajian risiko bencana, pengetahuan dan pendidikan, manajemen dan pengurangan kerentanan, dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Instrumen monitoring menggunakan (1) Perka BNPB No. 1 Tahun 2021 ada 16 prinsip dan 20 indikator; (2) SNI 8357-2017 tentang desa dan kelurahan tangguh; (3) Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), Tahun 2021; dan (4) Permendagri 101/2019: Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan Bencana. Inklusifitas dalam PRBBK banyak mengacu pada *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*/Kerangka Aksi Sendai dalam Pengurangan Risiko Bencana (*SFDRR*). Catatannya adalah, inklusifitas ini sebaiknya tidak hanya merangkul anak muda, perempuan, dan anak-anak, namun juga lansia dan *indigenous people*, serta kelompok migran. Praktik baik inklusifitas PRBBK yang sudah ada di Indonesia antara lain pelibatan anak muda dalam PRB. Adapun catatan penting yang muncul selama diskusi di wilayah dan dituangkan dalam kertas pleno #3 Pantauan kualitas dan inklusi dalam PRBBK:

1. *Empowering* inisiatif dari komunitas.
2. Gotong royong pentahelix menjadi kunci.
3. Perlunya *tools* monitoring partisipatif yang mudah dijangkau dan diisi oleh masyarakat (<http://www.aksikomunitas.id>).

4. Perlu mendorong *knowledge management* dan *knowledge production* dalam tingkat lokal secara partisipatif dan integrasi kearifan lokal, teknologi, serta pengetahuan modern.
5. Perlu mendorong aspek investasi ketangguhan infrastruktur untuk menjamin keselamatan masyarakat
6. Perlu mendorong *training of facilitator* secara rutin dan berkelanjutan untuk memberikan efek domino di daerah.
7. Perlu mendorong kapasitas dalam pengambilan keputusan.
8. Perlu mendorong kapasitas 7 objek ketangguhan.
9. Akselerasi PRBBK Inklusi dengan semangat ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, dan inovasi.
10. Kolaborasi, mobilisasi sumber daya (manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan)

Hasil temuan-temuan dalam sidang pleno KN PRBBK XIV 2021 mengemukakan kebutuhan untuk melakukan penguatan dalam beberapa aspek yang akan menjadi perhatian semua pihak pentahelix, untuk dapat membangun gerakan PRBBK yang lebih masif antara lain : (1) Tata Kelola, (2) Praktik, dan (3) Kualitas PRBBK di Indonesia agar terwujudnya kedaulatan, kebermanfaatan, kemandirian, keberlanjutan, dan penyebaran praktek-praktek PRBBK di Indonesia, khususnya wilayah yang rawan terhadap ancaman dan bencana.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami mengajak semua pihak agar dapat melakukan upaya-upaya berikut yang mencakup tiga aspek di atas antara lain :

I. Penguatan Tata Kelola PRBBK:

- 1) Mendorong dan memastikan harmonisasi dan sinergitas kebijakan perencanaan dan penganggaran terkait program PRBBK dari level nasional, daerah, dan desa atau kelurahan. Proses harmonisasi kebijakan ini digunakan sebagai acuan

koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan dari berbagai ragam sektor pembangunan agar terintegrasi sebagai kesatuan agenda pembangunan.

- 2) Menyusun kebijakan dan menerapkan praktik PRBBK yang inklusif dan secara substansi dapat diimplementasikan untuk menjawab kebutuhan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan dan/ atau berisiko tinggi termasuk didalamnya anak-anak, perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok lanjut usia, dan kelompok minoritas yang cenderung terpinggirkan.
- 3) Mendorong agar kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program PRBBK oleh para pelaku pembangunan menguatkan kearifan lokal, modal sosial, serta sosial-budaya masyarakat yang sejalan dengan ketangguhan bencana. Sepatutnya praktek dan pendekatan PRBBK mendukung, menguatkan, dan sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya serta visi pembangunan masyarakat.
- 4) Melakukan advokasi kepada para pelaku pembangunan terhadap perluasan PRBBK di Indonesia, secara khusus mendorong komitmen kepala daerah melakukan perluasan PRBBK dengan membuat kebijakan untuk optimalisasi sumber-sumber pendanaan¹ dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat di wilayahnya.
- 5) Melakukan peningkatan dan penguatan kapasitas kepada para pimpinan daerah, khususnya ditingkat desa/kelurahan untuk memiliki perspektif PRBBK dan kemampuan mengintegrasikannya kedalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diwilayah administrasi kerjanya.
- 6) Mendorong dan mengembangkan ketangguhan melalui pendekatan kawasan. Tata kelola kolaboratif menjadi strategi koordinasi dan komunikasi serta pelibatan berbagai pihak untuk penguatan PRBBK dalam satu kawasan rawan bencana².

¹ Untuk itu perlu dipahami semua pihak bahwa peluang pembiayaan PRBBK di tingkat daerah tidak hanya terpaku pada Dana Desa saja, namun masih terdapat skema Alokasi Dana Daerah (ADD), Dana bagi hasil, dan bantuan provinsi serta dari Kerjasama Multipihak.

² Dalam hal ini skema Kerjasama administrasi yang memiliki kesatuan bentangalam dan masuk dalam kawasan rawan bencana menjadi prioritas.

- 7) Mendorong penyusunan dan implementasi rencana tata ruang yang menerapkan prinsip-prinsip PRBBK dalam menjawab kebutuhan penataan ruang di wilayah rawan bencana.
- 8) Mendorong adanya kebijakan baik level nasional, daerah, dan desa atau kelurahan yang dapat mendukung pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) baik formal maupun non-formal³ serta pendidikan informal⁴ dalam program PRBBK, baik dari aspek koordinasi, keterkaitan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan, perencanaan pengurangan risiko, dan dukungan pembiayaan.
- 9) Mendorong kemudahan akses informasi risiko dan kapasitas desa atau kelurahan oleh semua pihak. Ketersediaan data ini diperlukan sebagai dasar menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.

II. Pemutakhiran Praktek dan Kemitraan PRBBK yang kuat

- 10) Mengintegrasikan risiko-risiko bencana secara holistik, termasuk perubahan iklim, degradasi lingkungan penanganan pandemi, termasuk COVID-19 dan risiko dari ancaman non-alam lainnya kedalam gerakan PRBBK yang berkontribusi membangun kesejahteraan dan memberikan perlindungan sosial
- 11) Melakukan pengintegrasian praktek PRBBK dengan dengan perguruan tinggi, kalangan akademisi, dan para peneliti serta pihak swasta untuk mendorong inovasi dan mendukung perluasan gerakan PRBBK yang bersifat inklusif, empati, dan iteratif serta dapat benar-benar menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, menjangkau ragam masyarakat di seluruh wilayah Indonesia

³ Terdapat banyak kelompok belajar atau entitas pendidikan yang informal dimasyarakat. Kelompok-kelompok ini berpotensi untuk pengintegrasian antar pendidikan dan PRBBK dalam sebuah kawasan rawan bencana.

⁴ pendidikan informal seperti di tingkat desa, keluarga, dan kelompok lainnya yg diluar institusi formal dan non formal

- 12) Melakukan pendokumentasian pengetahuan lokal secara partisipatif terkait karakter dan sejarah kebencanaan, potensi ancaman, dan model ketangguhan komunitas sebagai proses produksi pengetahuan PRBBK di Indonesia yang lebih kontekstual dan relevan.
- 13) Melakukan regenerasi pengetahuan dan keterampilan PRBBK di Indonesia melalui perluasan literasi, demokratisasi pengetahuan kebencanaan, dan optimasi peran institusi pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan pengelolaan pengetahuan termasuk didalamnya anak-anak, kaum muda, dan kelompok lanjut usia dengan mendukung pengembangan pengetahuan inter-generasi yang inklusif dengan mempertimbangkan gender dan status disabilitas.
- 14) Mendorong implementasi kebijakan Sistem Peringatan Dini Bencana (SPDB) dari hulu ke hilir yang optimal. Tidak hanya terfokus pada aspek pantauan ancaman, namun juga memperhatikan aspek-aspek pengetahuan risiko, diseminasi dan komunikasi informasi peringatan, serta penguatan kapasitas dalam merespon peringatan bencana oleh masyarakat yang tinggal dalam kawasan rawan bencana. SPDB harus sejalan dan memperhatikan aspek-aspek modalitas pengetahuan dan budaya masyarakat lokal dimana komunitas dan pemegang mandat dapat berjalan serta berfungsi optimal dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Dalam proses pengembangannya pelibatan masyarakat, pemanfaatan kapasitas dan rantai-jaring komunikasi masyarakat lokal perlu diselaraskan dengan sistem peringatan dini yang dikembangkan.
- 15) Melakukan kolaborasi yang inklusif, dan saling menguatkan fungsi, peran, kontribusi dan keterlibatan berbagai aktor dalam penguatan PRBBK. Sepatutnya dengan adanya kolaborasi yang inklusif tidak menghilangkan atau melemahkan kapasitas yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya membuka peluang program-program baru, pendanaan baru, serta inovasi.

III. Peningkatan mutu kualitas PRBBK yang berkelanjutan

- 16) Menjamin terjadinya proses pengawasan program-program PRBBK sehingga dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat secara berkelanjutan dan memperkuat hubungan dan modal sosial yang sebelumnya telah terbangun di masyarakat.
- 17) Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan para pihak serta membangun mekanisme umpan balik yang inklusif, sehingga mampu menghindari terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
- 18) Mengembangkan indikator capaian Program PRBBK⁵ sehingga meliputi elemen pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, pemetaan kualitas, dan juga memperhatikan aspek aset penghidupan yang disasar, dan pendistribusian program berdasarkan potensi tingkat ancaman bencana sehingga skala prioritas dapat ditentukan secara akurat.
- 19) Mendorong agar setiap program kebencanaan mengedepankan paradigma kesadaran kritis, sehingga masyarakat termasuk kelompok rentan dan berisiko tinggi dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai pelaku pembangunan ketangguhan melalui PRBBK.
- 20) Memperkuat kebijakan, koordinasi dan pengembangan kapasitas pentahelix (masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, jurnalis, perguruan tinggi) yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
- 21) Pengintegrasian PRBBK dalam sektor strategis, seperti: pendidikan; perlindungan & pengungsian; logistic; sarpras; penyelamatan dan pertolongan; pemulihan dini; ekonomi; dan kesehatan, serta mendorong kepemimpinan lokal.
- 22) Adanya pedoman kajian desa komprehensif yang dapat dilakukan secara mandiri, sehingga terpetakan aktor, akses, kapasitas, kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan PRBBK.

⁵ Termasuk didalamnya adalah Destana, Proklim, Kampung Siaga Bencana, SIBAT, dan program lainnya yang serupa.

- 23) Melakukan pengorganisasian, peningkatan kapasitas, dan penguatan jejaring relawan secara sistematis dan terstruktur, serta melibatkan badan usaha, media, dan universitas untuk terlibat aktif dalam memajukan ketangguhan masyarakat dan menjadi bagian dalam pengurangan risiko bencana. Mendorong pengakuan, dukungan, dan komitmen pemerintah daerah terhadap relawan dalam kegiatannya mendukung gerakan PRBBK
- 24) Mendorong pengembangan sistem informasi PRBBK yang inklusif dan partisipatif yang dapat diakses oleh semua pihak. Informasi ini diharapkan menjadi alat koordinasi, referensi bersama, dan basis untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, penyusunan, implementasi, dan monitoring PRBBK yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan.





POLICY POSITION PAPER CBDRM RECOMMENDATIONS IN INDONESIA RESULTS OF THE NATIONAL CONFERENCE FOR COMMUNITY-BASED DISASTER RISK MANAGEMENT XIV 2021



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade



This position paper is the result of synthesis and analysis of policy studies which are then evaluated through a reflection process in 20 regions. The results of the synthesis of the findings in the region are brought into the KN PRBBK XIV 2021, with the main agenda being to carry out Committee and Plenary Sessions that present resource persons from universities, ministries/agencies, INGOs, NGOs, media and communities representing 9 regions or islands throughout Indonesia (Sumatra, Java, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, and Papua) to formulate key findings that are reflected on for discussion and triangulation confirming various sources. Three main issues were discussed in the commission and plenary sessions involving more than 8,000 participants from all over Indonesia consisting of elements of the public, communities, volunteers, civil society organisations including organisations of persons with disabilities, religious/belief-based institutions, government, private entities, mass media, and academia. The discussion of the committee meeting aims to formulate a policy position paper that will be the material for building a roadmap for CBDRM in Indonesia. The focus of the discussion in the Plenary Session was:

1. CBDRM Governance: Operational Policies, Funding Mechanisms, and CBDRM Institutionalisation CBDRM

Governance in Indonesia starts from operational policies, funding mechanisms and CBDRM institutionalisation. In the first plenary discussion, various policies that can support CBDRM in villages and communities were identified, which are related to village-based programs that have loci in the village from various ministries and institutions. Operationally, existing policies have provided space for implementing CBDRM through village programs and village funds. The challenge faced is the large number of programs from various ministries, so that the village has a heavy burden to implement all programs, because there is no synchronisation between one program and another. On the other hand, there is an opportunity to synchronise all programs implemented in the village, because there are already guidelines/legal basis for integrating programs. To be able to achieve this big goal, there must be an understanding between all stakeholders at the

village level to higher levels. At the lowest level, it must be supported by regional policies or Regional Regulations (Perda) that can bridge village-based programs, because villages are very dependent on local governments as supervisors in the region through the Community and Village Empowerment Service. The DRR program is very likely to be included and integrated into programs implemented by other institutions/ministries by utilising funding sources at the village level. In addition, it is necessary to increase the capacity of local government and village government officials. The issue of decentralisation of DRR at the village level is quite interesting to discuss is how the government at the city/district level supports villages to be able to optimise DRR efforts in the village.

2. Resilient Model, Expansion Strategy including replication, modification, innovation, and collaboration

CBDRM is a movement within the community to build awareness in reducing disaster risk. The purpose of CBDRM is to make people aware that they are in disaster-prone areas, with this awareness, it is hoped that the community will be more active in activities to build preparedness. Because the community is the *first responder* when a disaster occurs, preparedness must start from the community itself. Talking about replication, the substance is to make people aware that they live in disaster-prone areas, so the community must develop a DRR pattern in accordance with their local wisdom in dealing with disaster risk. The replication that has been carried out so far continues to be developed with various innovations. For example, the approach in the Merapi community that has been considered successful, but in reality there is no harmony with the government. Learning from this condition, when replicating in other locations the approach was developed differently, involving the government from the start. Criticism for the Destana program, why the suspended village, why not the suspended area? Because talking about disaster will talk about the region. DRR efforts must be regionally based and it is hoped that each region can coordinate and collaborate with each other in DRR. Innovation means that CBDRM must continue to develop and be renewed. For

example, the current disaster issue is not a single issue, at one time there can be more than one different type of disaster, therefore, the issue of innovation must continue to be developed, otherwise our CBDRM model/method will be left behind. Coordination is not just fighting over resources, coordination is a very important thing, because if the coordination process does not go well, the disaster management process will be *chaotic*. Coordination is not only important for DRR actors, but also for donors. If these efforts are not carried out properly, there will be overlapping activities and will only waste existing resources. To build a good partnership is to reduce the institutional centric ego. Partnerships can be built between civil society organisations (CSOs), CSO partnerships with the government, and CSOs with donors. An important note is that the CSO's partnership with the government is not just one or two joint meetings, so that the essence of the partnership does not work. CSOs are not just affixed and become claims that the government has partnered with the community through CSOs. The CBDRM approaches are also diverse, and it is possible that all these approaches are correct. Several variants of CBDRM in Indonesia include time, actors, relationships, participation, space, issues, tools, and resources. Each group/community has different variants and all of them could be true, as long as it cannot be separated from the substance of CBDRM itself, which is bottom-up, involving the community in a participatory manner, and protecting the community with various assets they have.

3. Monitoring and Evaluation of CBDRM in Indonesia: Quality Control, Strengthening CBDRM Movements/Programmes, Independence and Sustainability

An important note in the CBDRM journey is to accommodate diversity by taking into account culture and local policies. in all regions in Indonesia. The synthesis of the reflection discussions in the regions are: (1) Integration of disaster education with aspects *livelihood*; (2) Formal active involvement of women; (3) Recognition of local culture; (4) Strengthening social capital; (5) The role of volunteers has not received optimal support and commitment from the authorities; (6) Integrating natural resource capabilities

through economic activities of communities living in disaster-prone areas; (7) Regeneration and regeneration; (8) The tools for supporting community actions are still limited; (9) External support is required; (10) A paradigm shift as a victim who must be helped; (11) Intervention processes that empower communities and change their mindset as actors in building resilience. Talking about the sustainability of CBDRM, there are three components that must be considered, namely: effectiveness, participation, and equality. quality monitoring and inclusion cannot be separated from the monitoring and evaluation process. National BNPB Destana program in accordance with BNPB Perka No. 1 of 2012. The CBDRM strategy is in accordance with John Twigg 2007 in the book *Indonesia's Experience Building Community Resilience: governance, disaster risk assessment, knowledge and education, vulnerability management and reduction, and disaster preparedness and response*. The monitoring instrument uses (1) BNPB Perka No. 1 Year 2021 there are 16 principles and 20 indicators; (2) SNI 8357-2017 concerning resilient villages and sub-districts; (3) Village Resilience Assessment (PKD), 2021; and (4) Permendagri 101/2019: Minimum Service Standards (SPM) for Disasters. Inclusiveness in CBDRM mostly refers to the *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/ the (SFDRR)*. The note is, this inclusiveness should not only embrace young people, women and children, but also the elderly and *indigenous people*, as well as migrant groups. Good practices of CBDRM inclusiveness that already exist in Indonesia include the involvement of young people in DRR. The important notes that emerged during the discussion in the region and were stated in plenary paper #3 Quality monitoring and inclusion in CBDRM:

1. Empowering community initiatives.
2. The pentahelix gotong royong is the key.
3. The need for *tools* participatory monitoring that are easily accessible and filled by the community (<http://www.aksikomunitas.id>).

4. It is necessary to encourage *knowledge management* and *knowledge production* at the local level in a participatory manner and the integration of local wisdom, technology, and modern knowledge.
5. Need to encourage investment aspects of infrastructure resilience to ensure community safety
6. Need to encourage *training of facilitators* regular and ongoing to provide a domino effect in the region.
7. Need to encourage capacity in decision making.
8. Need to push the capacity of 7 toughness objects.
9. Acceleration of CBDRM Inclusion with the spirit of science, engineering, technology, and innovation.
10. Collaboration, mobilisation of resources (human, facilities, infrastructure, and funding)

The findings in the XIV 2021 KN PRBBK plenary session highlight the need to strengthen several aspects that will be the concern of all pentahelix parties, in order to be able to build a more massive CBDRM movement. These include: (1) Governance, (2) Practices, and (3) Quality of CBDRM in Indonesia in order to realise sovereignty, benefit, independence, sustainability, and disseminate CBDRM practices in Indonesia, particularly in areas prone to hazards and disasters.

To realise this commitment, we invite all parties to undertake the following efforts covering the three aspects above, among others:

I. Strengthening CBDRM Governance:

- 1) Encouraging and ensuring the harmonisation and synergy of planning and budgeting policies related to CBDRM programs from the national, regional, and local levels.

village or hamlet. This policy harmonisation process is used as a reference for coordinating and synchronising development programs from various development sectors so that they are integrated as a unified development agenda.

- 2) Develop policies and implement CBDRM practices that are inclusive and substantially implementable to address the needs and take sides with vulnerable and/or high-risk groups including children, women, disability groups, indigenous peoples, elderly groups, and minority groups who tend to be marginalised.
- 3) Encourage the policy, planning and implementation of the CBDRM program by development actors to strengthen local wisdom, social capital, and community socio-culture in line with disaster resilience. CBDRM practices and approaches should support, strengthen, and be in line with socio-cultural values and the vision of community development.
- 4) Advocating to development actors for the expansion of CBDRM in Indonesia, specifically encouraging the commitment of regional heads to expand CBDRM by making policies to optimise funding sources⁶ and resources owned by the community in their area.
- 5) Carry out capacity building and strengthening for regional leaders, especially at the village/ sub-districts level to have a CBDRM perspective and the ability to integrate it into development programs and community empowerment in the working administration area.
- 6) Encourage and develop resilience through a regional approach. Collaborative governance is a strategy for coordination and communication as well as involving various parties to strengthen CBDRM in a disaster-prone area⁷.

⁶ For this reason, it is necessary for all parties to understand that the financing opportunities for CBDRM at the regional level are not only focused on the Village Fund, but there are still Regional Fund Allocation (ADD) schemes, profit-sharing funds, and provincial assistance as well as from Multi-stakeholder Cooperation.

⁷ In this case, the administrative cooperation scheme that has a unified landscape and is included in a disaster-prone area becomes a priority.

- 7) Encouraging the preparation and implementation of spatial plans that apply CBDRM principles in responding to spatial planning needs in disaster-prone areas.
- 8) Encouraging policies at the national, regional, and village or sub-district levels that can support the implementation of the Disaster Safe Education Unit (SPAB) program, both formal and non-formal⁸ as well as informal education⁹ in the CBDRM program, both from the aspect of coordination, linkages to mitigation and preparedness systems, planning risk reduction, and financial support.
- 9) Encouraging easy access to risk information and village or sub-districts capacity by all parties. The availability of this data is needed as a basis for planning, implementing, and monitoring development.

II. Updating of CBDRM Practices and Strong Partnerships

- 10) Integrating disaster risks holistically, including climate change, environmental degradation, handling pandemics, including COVID-19 and risks from other non-natural hazards into the CBDRM movement that contributes to building prosperity and providing social protection
- 11) Integrating practices CBDRM works with universities, academics, and researchers as well as the private sector to encourage innovation and support the expansion of the CBDRM movement that is inclusive, empathetic, and iterative in nature and can actually solve the problems that exist in society, reaching various communities throughout territory of Indonesia
- 12) Document participatory local knowledge related to the character and history of disasters, potential hazards, and community resilience models as a more contextual and relevant CBDRM knowledge production process in Indonesia.

⁸ There are many informal learning groups or educational entities in the community. These groups have the potential to integrate education and CBDRM in a disaster-prone area.

- 13) Regeneration of CBDRM knowledge and skills in Indonesia through literacy expansion, democratisation of disaster knowledge, and optimisation of the role of educational institutions. By involving the community in the production and management processes knowledge including children, youth, and elderly groups by supporting the development of inclusive inter-generational knowledge taking into account gender and disability status.
- 14) Encouraging the implementation of an optimal upstream to downstream Disaster Early Warning System (SPDB) policy. Not only focusing on the hazard monitoring aspect, but also paying attention to aspects of risk knowledge, dissemination, and communication of warning information, as well as capacity building in responding to disaster warnings by people living in disaster-prone areas. SPDB must be in line with and pay attention to aspects of the knowledge modality and culture of the local community where the community and the mandate holder can run and function optimally in increasing preparedness. In the process of developing community involvement, capacity utilisation and communication networks of local communities need to be harmonised with the developed early warning system.
- 15) Conducting inclusive collaboration, and mutually reinforcing the functions, roles, contributions, and involvement of various actors in strengthening CBDRM. It is appropriate that inclusive collaboration does not eliminate or weaken pre-existing capacities. On the other hand, it opens up opportunities for new programs, new funding, and innovation.

III. Continuous improvement of the quality of CBDRM

- 16) Ensure the process of monitoring CBDRM programs so that it can increase community resilience in a sustainable manner and strengthen relationships and social capital that had previously been built in the community.

⁹ Informal education such as at the village level, family, and other groups outside formal and non-formal institutions. This

- 17) To increase the capacity of the community and stakeholders as well as to build an inclusive feedback mechanism, so as to avoid gaps between policy and implementation.
- 18) Develop indicators for the achievement of the CBDRM Program¹⁰ so that it includes elements of prevention, mitigation, and preparedness, quality mapping, and also pays attention to aspects of targeted livelihood assets, and distribution of programs based on the potential level of disaster hazard so that priority scales can be determined accurately.
- 19) Encouraging that every disaster program puts forward a critical awareness paradigm, so that the community, including vulnerable and high-risk groups, can develop their potential as actors in building resilience through CBDRM.
- 20) Strengthening policies, coordination, and capacity building of the Penta helix (community, government, business actors, journalists, universities) that are centered on community needs.
- 21) CBDRM integration in strategic sectors, such as: education; protection & evacuation; logistics; infrastructure; rescue and assistance; early recovery; economy; and health and encourage local leadership.
- 22) There is a comprehensive village study guideline that can be carried out independently, so that actors, access, capacity, and policies are mapped to improve the community's ability to carry out CBDRM.
- 23) Organising, building capacity, and strengthening volunteer networks in a systematic and structured manner, and involving business entities, media, and universities to be actively involved in advancing community resilience and being part of disaster risk reduction. Encouraging local government recognition, support, and commitment to volunteers in their activities to support the CBDRM movement.

¹⁰ includes Destana, Proklam, Disaster Preparedness Village, CBAT, and other similar programs.

- 24) Encourage the development of an inclusive and participatory CBDRM information system that can be accessed by all parties. This information is expected to become a coordination tool, common reference, and basis for decision making in the process of planning, drafting, implementing, and monitoring CBDRM that is integrated with all development sectors.